

**SKRIPSI**

**PENGETAHUAN MASYARAKAT TERKAIT PERHUTANAN SOSIAL  
(STUDI KASUS PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm)  
DI DESA TALLAMBALAO KABUPATEN MAJENE)**

**MUH IKBAL  
A0218324**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN  
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE  
2025**

**PENGETAHUAN MASYARAKAT TERKAIT PERHUTANAN SOSIAL  
(STUDI KASUS PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN  
(HKm) DI DESA TALLAMBALAO KABUPATEN MAJENE)**

**MUH IKBAL  
A0218324**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Kehutanan Pada Program Studi Kehutanan  
Fakultas Pertanian dan Kehutanan

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN  
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE  
2025**



UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN  
PROGRAM STUDI KEHUTANAN  
PROGRAM SARJANA

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Ikbal

NIM : A0218324

Program Studi : Kehutanan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengetahuan Masyarakat Terkait Perhutanan Sosial (Studi Kasus Program Hutan Kemasyarakatan di Desa Tallambalao Kabupaten Majene)” adalah benar merupakan hasil karya saya di bawah arahan dosen pembimbing dan belum pernah di ajukan ke perguruan tinggi manapun serta seluruh sumber manapun yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Majene, 26 Mei 2025



Muh Ikbal  
NIM. A0218324

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengetahuan Masyarakat Terkait Perhutanan Sosial  
(Studi Kasus Program Hutan Kemasyarakatan di  
Desa Tallambalao Kabupaten Majene)

Nama : Muh. Ikbal

NIM : A0218324

Disetujui oleh :

Pembimbing I



Fitri Indhasari, S.Hut., M.Hut  
NIDN. 0911078702

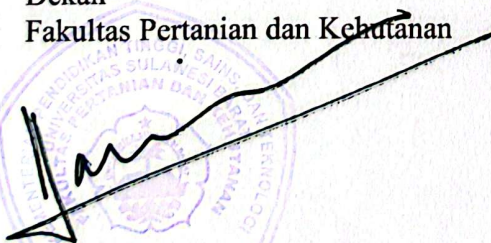
Pembimbing II



Andi Ridha Yayank, S.Hut., M.Hut  
NIDN. 0016059501

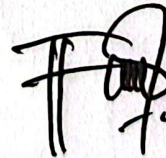
Diketahui Oleh:

Dekan  
Fakultas Pertanian dan Kehutanan



Prof. Dr. Ir. Kaimuddin, M.Si  
NIP. 19600512 198903 1003

Ketua Program Studi  
Kehutanan



Fitri Indhasari, S.Hut., M.Hut.  
NIP. 19870711 201903 2 016

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul :


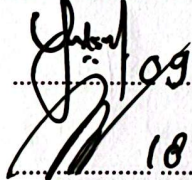

**PENGETAHUAN MASYARAKAT TERKAIT PERHUTANAN SOSIAL  
(STUDI KASUS PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN  
(HKm) DI DESA TALLAMBALAO KABUPATEN MAJENE)**

Disusun Oleh:


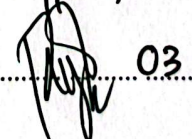
**MUH. IKBAL  
A0218324**

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Pertanian Dan Kehutanan  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
Pada Tanggal 28 Mei 2025 dan dinyatakan **LULUS**

### SUSUNAN TIM PENGUJI

Tim penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1. Muhammad Arafat Abdullah, S.Si.,M.Si		02/06/2025
2. Yulsan Demma Semu, S.Hut.,M.Hut		09/06/2025
3. Muhammad Sarif, S.Hut.,M.Si		18/06/2025

### SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING

Komisi Pembimbing	Tanda Tangan	Tanggal
1. Fitri Indhasari, S.Hut.,M.Hut		02/06/2025
2. Andi Ridha Yayank, S.Hut.,M.Hut		03/06/2025

## **ABSTRAK**

**Muh Ikbal (A0218324). Pengetahuan Masyarakat Terkait Perhutanan Sosial (Studi Kasus Program Hutan Kemasyarakatan di Desa Tallambalao Kabupaten Majene), di bimbing oleh FITRI INDHASARI dan ANDI RIDHA YAYANK**

Perhutanan sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mewujudkan hak akses dan hak kelola terhadap kawasan hutan bagi masyarakat sekitar hutan yang pada akhirnya memberikan distribusi keuntungan bagi masyarakat. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui Pengetahuan Masyarakat Terkait Perhutanan Sosial di Desa Tallambalao Kecamatan Tammerodo Sendana. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil wawancara, masyarakat Desa Tallambalao terdapat lima pengetahuan yang menjadi hal penting dalam pengelolaan HKm yaitu pengetahuan masyarakat tentang konsep (HKm), pengetahuan tentang syarat dan proses pengajuan HKm, pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam pengelolaan, pengetahuan tentang kegiatan yang diperbolehkan dan pengetahuan tentang manfaat HKm bagi masyarakat dari segi ekonomi, sosial dan ekologi.

Kata kunci: Hutan Kemasyarakatan, pengetahuan masyarakat, perhutanan sosial, Desa Tallambalao.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perhutanan sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mewujudkan hak akses dan hak kelola terhadap kawasan hutan bagi masyarakat sekitar hutan yang pada akhirnya memberikan distribusi keuntungan bagi masyarakat (Suharjito dan Darusman, 1998). Beberapa skema perhutanan sosial telah ditawarkan dimana salah satunya adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan Masyarakat (KLHK, 2016). HKm juga merupakan pemberdayaan dan pemberian kepercayaan kepada masyarakat setempat yang tinggal didalam sekitar kawasan hutan untuk mengusahakan hutan negara sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan pengetahuan sehingga kelestarian sumberdaya hutan dapat dipertahankan. HKm ditetapkan oleh pemerintah pada masing-masing wilayah.

Pelaksanaan HKm secara nasional telah dikembangkan pada 22 Provinsi dengan luas keseluruhan sekitar 448.217 Ha yang terdiri dari areal usulan penetapan wilayah HKm (162.112,91 Ha), areal pembangunan HKm (208.327 Ha), areal kerja sosial forestry (55.420 Ha) dan areal yang diberi izin sementara (62,357 Ha) (Nandini, 2013). Total kelompok masyarakat yang terlibat pada kegiatan HKm adalah 515 kelompok (Media DAS,2007). Salah satu provinsi yang telah melaksanakan HKm adalah Provinsi Sulawesi Barat. Hutan Kemasyarakatan tersebut di kelola oleh KTH Bura Sendana berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK. 8529/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 tanggal 10 Agustus 2018, dengan luas kelola 50,62 Ha.

Pengelolaan hutan kemasyarakatan di Desa Tallambalao Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene belum

menunjukkan manfaat yang signifikan khususnya pada masyarakat pengelola disekitar lokasi. Banyak hal yang diduga menjadi faktor penyebab belum maksimalnya pengelolaan dan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat pengelola berupa kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep hutan kemasyarakatan termasuk program-program pengelolaan di dalamnya. Zainal (2007) mengemukakan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan belum berhasilnya pelaksanaan HKm untuk dapat mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan antara lain adalah luas garapan yang tidak sesuai dengan jumlah peserta, sistem usaha tani yang masih sederhana dan subsistem, kemampuan swadaya masyarakat yang relatif kecil karena hasilnya kurang bagus dan lebih cenderung ke tanaman semusim, belum ada jaminan kepastian hukum dan kepastian usaha dari pemerintah, serta pengelolaan masih *on farm* dan belum memperhatikan input pasca panen dan pemasaran sehingga nilai tambah kecil. Hal ini sejalan dengan penelitian Nandini (2013) mengatakan bahwa faktor pembatas dari aspek teknik yang menyebabkan kondisi HKm di hutan produksi berada dalam kondisi sedang adalah kondisi biofisik dan kondisi tanaman, faktor pembatas kelembagaan adalah sistem pengelolaan kelembagaan, sedangkan faktor pembatas ekonomi adalah potensi ekonomi Hkm.

Untuk mengetahui implementasi pengelolaan HKm di KTH Bura Sendana Desa Tallambalao Kecamatan Tammerodo Sendana perlu dilakukan kajian termasuk untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pengelolaan tersebut. Hasil studi dapat dijadikan sebagai suatu bentuk evaluasi dan pertimbangan dalam perumusan program pengelolaan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari berbagai permasalahan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana Pengetahuan Masyarakat Terkait Perhutanan Sosial di Desa Tallambalao Kecamatan Tammerodo Sendana?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini ingin mengetahui Pengetahuan Masyarakat Terkait Perhutanan Sosial di Desa Tallambalao Kecamatan Tammerodo Sendana.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dasar mengenai pengetahuan masyarakat terkait perhutanan sosial di Desa Tallambalao Kecamatan Tammerodo Sendana.
2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dengan pembaharuan data tentang pengetahuan masyarakat terkait perhutanan sosial di Desa Tallambalao Kecamatan Tammerodo Sendana.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat sekitar kawasan hutan dalam memanfaatkan hutan lindung.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Desa Tallambalao dapat disimpulkan bahwa terdapat lima pengetahuan yang menjadi terhadap pengelolaan HKm yaitu pengetahuan masyarakat tentang konsep (HKm), pengetahuan tentang syarat dan proses pengajuan HKm, pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam pengelolaan, pengetahuan tentang kegiatan yang diperbolehkan dan pengetahuan tentang manfaat HKm bagi masyarakat dari segi ekonomi, sosial dan ekologi.

#### 6.2 Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan kepada masyarakat agar pemahaman tentang hak, kewajiban, serta kegiatan yang diperbolehkan dalam pengelolaan HKm semakin meningkat.
2. Masyarakat didorong untuk tidak hanya fokus pada manfaat ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan agar pengelolaan HKm tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, S. 1989. *Konservasi Tanah dan Air*. IPB Press, Bogor.
- Arsyad, U. 2010. *Analisis Erosi Pada Berbagai Tipe Penggunaan Lahan dan kemiringan Lereng di Daerah Aliran Sungai Jeneberang Hulu*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, UNHAS. Makassar.
- Ariani, F. dan Yuwono T. 2022. *Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di RPH Kepek, BDH Playen, KPH Yogyakarta*. [skripsi] Fakultas Kehutanan UGM
- Andryansah, O., Nurrochmat, D.R. Dan Kosmaryandi N. 2019. Model Efektivitas Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Wisata Alam Di Kabupaten Bangka Tengah. *Jurnal Media Konservasi Vol. 24 No. 2*
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene. (2023). *Majene dalam Angka 2023*. Majene: BPS Kabupaten Majene.
- Departemen Kehutanan, 1999. Undang-Undang Negara republik Indonesia Nomor 41 tentang Kehutanan. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum, 2005. *Pemanfaatan Lahan Berbasis Rencana Tata Ruang Sebagai Upaya Perwujudan Ruang Hidup Yang Nyaman, Produktif, Dan Berkelanjutan*. Bogor.
- Direktorat Jenderal PSKL. 2020. *Perhutanan Sosial: Panduan Teknis dan Praktik Baik*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Dodirman. 2018. *Analisis Pendapatan Masyarakat sekitar Hutan Didesa Puncak Harapan Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*. Skripsi Rogram Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.
- FAO, 1976. *Framework For Land Evolution*. FAO Soils Bulletin. Soil Resources Management and Conservation Service Land and Water Development Division.
- Fisher, R. J., Schmidt, K., Steenhof, B., & Akhter, M. 2000. *People and forests: Policy and local reality in Southeast Asia, the Russian Far East, and Japan*. IUCN.

- Kementerian LHK. 2022. *Perkembangan Perhutanan Sosial di Indonesia*. Jakarta: KLHK
- Larson, A. M., Barry, D., & Ram Dahal, G. 2006. *Tenure reform in the forests of Latin America: An overview*. CIFOR.
- Maryudi, A., & Krott, M. 2012. "Poverty Alleviation Efforts through a Community Forestry Program in Java, Indonesia." *Journal of Sustainable Development*, 5(2), 43–53.
- Miles, M. B. dan Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Nandini. 2013. Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Pulau Lombok. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman Vol. 10 No. 1*
- Ostrom, E. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. *Pedoman Umum Perhutanan Sosial*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
- Peraturan Menteri LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Pretty, J. N. 1995. "Participatory learning for sustainable agriculture." *World Development*, 23(8), 1247–1263.
- Rahman, A., & Syam, R. 2020. Peran Kelompok Tani Hutan dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Sulawesi Barat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 17(3), 145-156.
- Rajati, T. 2006. *Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Kehutanan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sekitar Hutan Kabupaten Sumedang*. PascaSarjana. IPB.Bogor.
- Sajogyo dan Pudjiwati. 1981. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Siscawati, M. 2017. "Keadilan Sosial dan Gender dalam Perhutanan Sosial di Indonesia." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 14(3), 203–216.

- Siscawati, M., & Mahaningtyas, A. 2012. *Menuju keadilan iklim: Tantangan dan peluang REDD+ untuk perempuan dan masyarakat adat di Indonesia*. HuMa dan WRI.
- Sugiyono. 2018. *Metode Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Seyhan.E.1990. *Dasar-dasar Hidrologi*. Gadjah Mada University Press.Yogyakarta.
- Senoaji G. 2019. Kontribusi hutan lindung terhadap pendapatan masyarakat desa di sekitarnya: studi kasus di desa air lanang bengkulu. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan, Vol. 16, No.1*
- Sobrin. 1987. *Pendapatan Masyarakat*. Yokyakarta Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Suharyanto. 2021. *Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Buku Obor.
- Tari, M. Muin, S. dan Widiastuti T. 2017. Pendapatan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hasil Hutan Tembawang Di Dusun Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. *Jurnal Hutan Lestari Vol. 5 (2)*
- Thomas Edison, 2000. *Definisi Tentang Pendapatan Masyarakat* (Online). Diakses 21 Juli 2023.
- Wulandari, C., & Inoue, M. (2018). "The Importance of Local Institutions in Ensuring the Sustainability of Forest Management under the Decentralization Policy in Indonesia." *Forest Policy and Economics, 92*, 1–15.
- Zulaifah S. 2006. *Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Untuk Pengembangan Kawasan Hutan Regaloh di Kabupaten Pati Jawa Tengah*. Program Magister Teknik Pengembangan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.